



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Juni 2017.
Pukul	: 15.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II BPK RI Tahun 2016; 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016; dan 3. Pembahasan RKP dan RKA-KL TA 2018.
Hadir	: 39 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Arief Yahya/Menteri Pariwisata beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.30 oleh Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II BPK RI Tahun 2016

Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk segera menyelesaikan aset yang belum dapat ditelusuri sejumlah Rp1.691.859.700,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

B. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenpar RI atas Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan dari Tidak Memberikan Pendapat (TMP) untuk tahun 2014 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2015, dan dipertahankan pada tahun 2016 dengan opini WTP. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI agar dapat mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk segera menyelesaikan temuan kekurangan penerimaan pajak yang belum terselesaikan sebesar Rp4.495.099.953,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

C. Pembahasan RKP dan RKA-K/L TA 2018

1. Kemenpar RI menyampaikan kegiatan strategis tahun 2018 adalah sbb:
 - 1) Digital *tourism* (E-*tourism*)
 - 2) *Homestay* Desa Wisata
 - 3) Aksesibilitas Udara
 - 4) *Branding*/PR-ing
 - 5) Top-10 Organisasi
 - 6) Top-3 Destinasi Utama
 - 7) Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
 - 8) Sertifikasi Kompetensi SDM dan Gerakan Sadar Wisata
 - 9) Peningkatan Investasi Pariwisata
 - 10) Pengelolaan Pusat Krisis
2. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No: S-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01.05/2017 tanggal 9 Mei 2017, pagu indikatif RAPBN TA 2018 Kemenpar RI adalah sebesar **Rp3.724.908.100.000,- (tiga triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang didalamnya terdapat anggaran fungsi pendidikan sebesar **Rp728.000.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh delapan miliar rupiah).
3. Dalam rangka upaya pencapaian target pariwisata TA 2018, Kemenpar RI mengajukan anggaran sebesar Rp 9 triliun melalui Surat Menteri Pariwisata No. KU.101/1/4/MP/2017 tanggal 20 Maret 2017.
4. Berkenaan bahan raker yang disampaikan belum menjelaskan rujukan, basis data yang digunakan, satuan biaya, target/sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA-K/L TA 2018, Komisi X DPR RI tidak dapat membahas dan menelaah RKP dan RKA-K/L TA 2018 secara mendalam utamanya terhadap 10 (sepuluh) usulan kegiatan strategis Kemenpar TA 2018 sebagaimana dimaksud pada poin II.C.1.

5. Terhadap dokumen rapat dan usul pagu indikatif RAPBN TA 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf II.C.1 dan C.2, Komisi X DPR RI belum menyetujui usulan pagu indikatif maupun alokasi anggaran di masing-masing Deputi dan program/kegiatan, karena Komisi X DPR RI memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk membuat perbandingan (komparasi) kinerja tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 serta target/sasaran tahun 2018 sebagai referensi dalam perbaikan RKP dan RKA-K/L TA 2018.
6. Terhadap RKP dan RKA K/L TA 2018 Kemenpar RI, Komisi X DPR RI memberikan catatan antara lain:
 - 1) Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyampaikan basis data, ukuran, keluaran (*output*), dan efektifitas 10 (sepuluh) kegiatan strategis 2018 yang dikaitkan dengan target kepariwisataan yang telah ditetapkan.
 - 2) Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyampaikan peta jalan (*road map*) pengembangan wisata halal yang dikaitkan dengan negara pesaing yang mayoritas penduduknya bukan muslim.
 - 3) Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk memperhatikan destinasi wisata non prioritas, dan terus meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait agar pengembangan pariwisata dapat lebih maju.
7. Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan/saran Anggota Komisi X DPR RI dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin II.C.4 s.d. C.6 ke Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat 23 Juni 2017.

III. PENUTUP

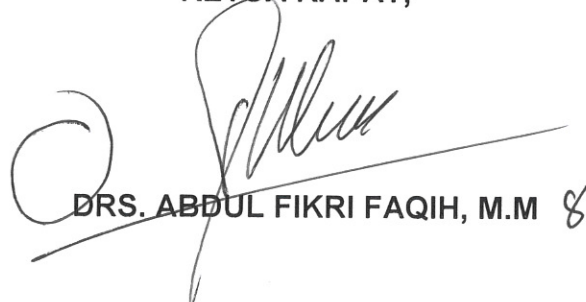
Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

MENTERI PARIWISATA RI,



ARIEF YAHYA

KETUA RAPAT,



DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. 8